

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sumber daya manusia memiliki faktor penting dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di dalam instansi pemerintah. Sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai pegawai atau tenaga kerja yang membantu tercapainya tujuan lembaga/instansi pemerintahan. Lembaga/instansi pemerintahan akan memiliki kesempatan yang baik untuk bertahan dan maju apabila memiliki pegawai atau tenaga kerja yang tepat dan berkompeten. Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan pangkat maupun golongan beserta dengan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji pokoknya.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa setiap pegawai negeri berhak untuk mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ketentuan Pasal 7 Undang -Undang Nomor 8 tahun 1974 tersebut merupakan suatu landasan penggajian Pegawai Negeri Sipil menuju terwujudnya tingkat kehidupan yang layak bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya.

Sistem penggajian adalah salah satu hal yang berkaitan dengan pengelolaan kesejahteraan pegawai sehingga harus diberi perhatian khusus oleh instansi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuannya. Gaji memiliki arti yang sangat penting bagi karyawan karena gaji merupakan cerminan nilai atas karya, kontribusi, dan kinerja pegawai, baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun bagi

diri mereka sendiri. Seperti halnya sistem-sistem lain yang terdapat di perusahaan, sistem penggajian rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan (*fraud*), kesalahan manusia (*human error*), bahkan ketidakandalan sistem dan ketidaktepatan sistem yang digunakan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan (Fidiya, 2010: 1).

Masalah belanja pegawai merupakan hal yang sangat sensitif dan mempunyai dampak politis yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, masalah belanja pegawai memerlukan penanganan yang baik, tertib, dan teratur pada setiap bagian yang terkait, baik pada bagian kepegawaian sebagai sumber data maupun pada bagian keuangan di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan sejalan dengan pelimpahan kewenangan Administratif sebagaimana diamanatkan undang-undang. Kesalahan dalam melakukan pembayaran belanja pegawai dapat berakibat tuntutan ganti rugi atau perdata oleh pihak-pihak yang dirugikan.

Suatu instansi pemerintahan sebaiknya mempunyai sistem penggajian yang baik, karena bila instansi pemerintahan tersebut tidak memiliki suatu sistem penggajian yang baik, akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Terbukti dengan banyak lembaga atau instansi pemerintah yang menggunakan sistem komputerisasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kreativitas dan aktivitas para pegawai sehingga menjadikan lembaga ataupun instansi pemerintah memiliki kompetensi yang tinggi dan terciptanya akuntabilitas serta transparansi terhadap informasi keuangan khususnya informasi penggajian.

Realisasi Belanja Gaji pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim pada tahun 2013 sebesar 16.653.941.337 yang terdiri dari belanja gaji pokok dan tunjangan-tunjangan. Dengan angka yang tidak sedikit tersebut diperlukan pengelolaan yang baik, tertib, dan teratur. Penerapan sistem penggajian yang benar dan keterpaduan dari berbagai fungsi yang terkait, diharapkan dapat mengatasi adanya resiko kecurangan dan penyelewengan terhadap sistem penggajian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN DI KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI JAWA TIMUR”**. Masalah ini dianggap sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana sistem yang berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga dapat diketahui masing-masing dari sistem dan urutan kerjanya.

## **1.2 Penjelasan Judul**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul dalam Tugas Akhir, maka penyusun akan memberikan pengertian dan batasan mengenai judul tersebut.

### **Evaluasi**

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan.

## **Sistem**

Merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

## **Penggajian**

Penggajian adalah suatu pembayaran upah sebagai balas jasa yang dibayarkan secara berkala.

## **Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

### **Provinsi Jawa Timur**

Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur adalah Lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi sistem penggajian di kantor perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Timur?

2. kendala-kendala apa saja dalam evaluasi sistem penggajian di kantor perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Timur?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang fungsional dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tujuan penyusunan tugas akhir adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui penerapan sistem penggajian di kantor perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mendapatkan gambaran dan informasi lebih lanjut mengenai sistem penggajian yang dilakukan oleh kantor perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Timur

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai tujuan penelitian, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, yaitu diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai evaluasi sistem penggajian pada BPKP provinsi Jawa Timur serta mengaitkan teori-teori yang di dapat selama perkuliahan terhadap kondisi yang nyata dilapangan.

## 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang telah ada mengenai sistem penggajian pada BPKP provinsi Jawa Timur.

## 3. Bagi pihak lain (pembaca)

Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi yang mengambil TA dengan permasalahan yang hampir sama, serta bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian ini.

## **1.6 Metode Penelitian**

### 1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pengamatan Tugas Akhir dibatasi hanya pada evaluasi sistem penggajian pada BPKP provinsi Jawa Timur.

### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Berbagai metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis untuk mendapatkan dan menganalisis data yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu:

#### 1. Studi Pustaka

Metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan sumber dengan cara mengumpulkan bahan, membaca dan mempelajari berbagai sumber teks, buku, makalah, serta undang-undang atau peraturan

yang terkait dengan pembahasan laporan studi lapangan ini. Diharapkan melalui metode ini penulis mampu memperoleh gambaran umum dan pengertian awal atas praktik / studi lapangan yang akan dihadapi.

## 2. Penelitian Lapangan

Terdiri dari dua metode yaitu:

### a. Observasi

Yaitu metode dengan mengamati langsung pada obyek studi lapangan dengan mempelajari dokumen-dokumen, dasar, dan kegiatan dalam sistem penggajian di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur.

### b. Wawancara/Interview

Yaitu metode yang dilakukan di lapangan dengan berbicara kepada narasumber/orang/bagian unit kerja yang terkait dengan sistem dan prosedur penggajian di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur.